

Bisnis yang Beretika dan Kaitanya dengan Globalisasi

Sigit Adi Triyanto¹, Haidir Tajiri²

Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

sigit@staisdharma.ac.id, tajiri@staisdharma.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.323>

Disubmit: (Juni 2024) | Direvisi: (Juni 2024) | Disetujui: (Juni 2024)

Abstrak

Sekitar tanggal 12 Juni 2015, Aljazeera.com menyampaikan bahwa India adalah negara dengan buruh anak-anak termiskin di dunia, dengan jumlah kurang lebih dari 28 juta anak-anak. Di hampir seluruh dunia saat itu terdapat kurang lebih dari 150 juta anak-anak berusia 5-15 tahun yang memungkinkan terlibat di jalur perdagangan. Laporan PBB di tahun yang sama menyatakan 300 juta manusia hidup dalam tekanan kemiskinan di India. Kendati demikian India telah mengerjakan hukum perburuhan yang melarang Pabrik-pabrik mempekerjakan anak-anak di bawah usia 14 tahun, akan tetapi Perdana Menteri Narendra Modi “hanya” akan mengamandemen peraturan hukumnya dan tidak menghilangkannya. Alasan penguasa India agar tetap membolehkan anak-anak bekerja ialah suatu hal yang sudah semestinya andaikata anak petani membantu sanak familinya setelah jam pelajaran. Jadi, pelaku usaha tidak menginginkan wujud pekerjaan dalam komoditi tersebut tidak boleh karena produsennya anak-anak.

The Bachpan Bachao Andolan (BBA), adalah LSM yang diketuai oleh yang menjuarai Nobel Perdamaian 2014, Kailash Satyarthi memberikan masukan amandemen RUU yang akan diaplikasikan oleh PM India, “Saat ini anak-anak di bawah usia 14 tidak diizinkan untuk 18 macam pekerjaan dan 65 macam dalam proses dengan alasan dianggap membahayakan. Kendati demikian harus di mengerti juga, ada sudut pandang berbeda jelas antara anak-anak yang bekerja untuk sanak famili dan pekerja anak yang berkaitan dengan perusahaan keluarga. Buruh anak sangat perlu diterangkan ciri-cirinya secara spesifik dan secara jelas dalam undang-undang agar anak-anak tidak dieksploitasi pada nama pekerjaan yang bergolongan keluarga. Pada dasarnya, mempekerjakan anak-anak untuk terlibat langsung dalam bisnis serta perburuhan telah menjadi hal tidak etis terorganisir terbesar di dunia dan hal demikian akan terus berkelanjutan dilakukan atas nama Perusahaan famili.

Kata Kunci : Bisnis, Etika, Globalisasi.

Bisnis dan Globalisasi

Globalisasi sudah memotivasi cara aktivitas ekonomi dan perbisnisan di semua dunia menjadi satu komponen pasar tanpa gangguan batas teritorial suatu negara. Globalisasi juga membuahakan mitra antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional tambah akrab.

Rangkaian bisnis global sangat tergantung dengan pembuatan integrasi ekonomi antar negara serta pembuatan sebuah pola ekonomi. Ketika metode aktivitas bisnis nasional bergabung ke dalam suatu lingkaran peraturan bisnis global.¹

Prosedur globalisasi telah dilakukan sejak ditandatanganinya perjanjian perdagangan internasional pada bulan April 1947 yang dikenal selaku Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. GATT adalah Kumpulan preskripsi internasional yang mengatur integritas perdagangan antar pemerintah. GATT juga berperan sebagai forum negosiasi perdagangan antar pemerintah dan pengadilan guna membereskan perselisihan dagang antar bangsa. GATT berlaku sampai penandatanganan Perjanjian Putaran Uruguay pada 123 negara di maroko pada 14 April 1994 yang menentukan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 1 Januari 1995. WTO memotivasi terealisainya Lembaga kerja sama ekonomi antar negara, seperti The North American Free Trade Agreement (NAFTA) antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, juga The Asia Pasific Economy Conference (APEC) antarnegara di lingkungan Asia Pasifik.²

Globalisasi menyuguhkan untuk banyak Perusahaan, buruh/karyawan, dan pengusaha guna mencari peluang pasar baru, memperluas jalur produk lini dan mencari finansial produksi yang minim di negara-negara lain. Iklan praktik dagang/bisnis baru dan cara mengaplikasikan bisnis akan memperbaiki standar hidup negara-negara miskin, kendati demikian di jalur lain juga memunculkan fenomena masalah-masalah dalam etika bisnis. Permasalahan etika yang berkembang ialah fungsi dari silang pendapat perkembangan ekonomi, politik, sistem hukum, dan budaya di setiap negara.

Industri-industri di negara Eropa dan Amerika Serikat akan bertatap muka dengan kabar buruk etika. Ketika mengaplikasikan bisnis di negara-negara yang tidak sama. Mereka mengalokasikan lokasi produksi ke negara-negara lain yang faktor-faktor produksi berbiaya terjangkau. Di beberapa negara sedang berkembang, pemberlakuan jam kerja yang melelahkan. Mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja, dan upah yang sangat rendah adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Selama beberapa decade tahun kedepan,

¹ Altham, J. 2001. *Business Ethics versus Corporate Social Responsibility: Competing or Complementary Approaches*. International Business Ethics Review, pp. 10-12

² Arneson, Richard. 2008. *Equality of Opportunity*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2008 Edition. August 29.

pemasok minuman buah-buahan Minute Maid di Afrika Selatan mempekerjakan anak-anak tidak sekolah berusia 9 tahun untuk memanen berbagai macam buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan buah-buahan lain. Kabar burung serupa terjadi Ketika Nestle, Cargill, dan Archer Daniel Midland mengalokasikan biji coklat dari perkebunan di sebelah Barat Afrika yang memerintahkan kerja kepada 280.000 anak-anak yang diperlakukan seperti budak. Di San Miguelito, Meksiko, terdapat 4.500 pekerja yang menjahit bola sepak, beberapa diantaranya adalah anak-anak berusia 8 tahun yang bekerja selama 6 jam sepulang sekolah dengan upah hanya \$3 per harinya. Meskipun mempekerjakan anak-anak adalah Tindakan yang ilegal, tetapi pemerintah Meksiko membiarkan hal itu terjadi.³

Adakalanya pemimpin Perusahaan taat hukum di negaranya sendiri, seperti di negara sedang berkembang, tetapi perlakuan mereka terhadap karyawan akan dianggap tidak etis bila dilihat dari standar etika di negara-negara maju. Di Negara-negara maju lebih menghargai hak-hak manusia secara mendasar dibandingkan negara-negara berkembang. Tidak sedikit orang berpendapat bahwa Tindakan Perusahaan asing, contohnya Apple yang bekerjasama dengan pemasok asing, selanjutnya memperlakukan karyawannya dengan tidak baik adalah Tindakan yang sangat tidak etis. Pada dasarnya, Apple sudah mengantisipasi kejadian tersebut dengan menerapkan standar kode etik pada praktik perburuhan di tempat tersebut.

Tidak sedikit contoh pemimpin perusahaan yang membuat keputusan etis yang tidak benar Ketika terlibat langsung dalam perniagaan Internasional. Istilah etika mengambil kiblat pada ketentuan-ketentuan yang diterima secara benar atau salah yang mengatur perilaku seseorang, anggota profesi, atau Tindakan sebuah organisasi. Etika Bisnis adalah ketentuan-ketentuan yang diterima secara benar atau salah yang mengatur perilaku para pelaku bisnis dan strategi etis. Strategi yang beretika adalah strategi atau Tindakan yang tidak melanggar aturan-aturan yang telah diterima.

³ Birdi, K., et. al. 2008. *The Impact of Human Resource and Operational Manajemen Practices on Company Productivity*. Personnel Psychology, Vol.61, pp. 467-501.

Keunggulan Globalisasi Bisnis

1. Meningkatnya produksi di negara-negara yang memiliki kesiapan teknis, faktor pembuatan murah, dan keahlian SDM.
2. Memperluas pasar ke negara lain dan menjadikan produk domestic mampu bersaing di negara lain.
3. Membuka jalan keluar masuknya barang-barang global ke dalam pangsa pasar domestic.
4. Perusahaan skala besar akan berproduksi di berbagai negara guna biaya pembuatan menjadi lebih murah alhasil semua negara dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang mumpuni.
5. Industri global memiliki kesempatan yang cukup guna menerima pinjaman atau melakukan investasi di semua negara alhasil menyediakan dana tambahan untuk Pembangunan Ekonomi.
6. Penggunaan tenaga kerja asing yang makin leluasa sehingga dapat meningkatkan kemakmuran publik suatu bangsa.
7. Kesempatan kerja menjadi makin luas sehingga intensitas pengangguran berkurang.
8. Masyarakat internasional dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi karena kemajuan teknologi yang sangat pesat, termasuk informasi dan berita ekonomi/bisnis di seluruh dunia secara real time.
9. Adanya penurunan dan penyeragaman tarif, serta penghapusan berbagai hambatan nontarif dalam bidang perdagangan.
10. Meningkatnya wisatawan yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan sebagai ajang promosi produk Indonesia.
11. Terbukanya pasar bebas yang membuat makin mudahnya mengimpor dan mengekspor barang.
12. Bisa memperoleh barang-barang yang kita butuhkan dari luar negeri.⁴

⁴ *Supply Chain Management for Global Competitiveness*. November 20-21, 1998, Management Development Institute, Gurgaon.

Kelemahan Globalisasi Bisnis

1. Menstatiskan pertumbuhan sektor bisnis tertentu di negara sedang berkembang. Selain itu, meningkatkan ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki Perusahaan Multinasional.
2. Kepada Negara-negara yang belum cukup menjadi produsen mandiri haruslah mengimpor barang komoditi yang diperlukan. Apabila nilai impor > ekspor akan memperburuk neraca perdagangan dan pembayaran negara terkait.
3. Sektor pembiayaan keuangan serta merta kurang seimbang. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan oleh banyaknya biaya yang terkirim ke luar negeri yang menyebabkan ketidakstabilan dan memperkeruh perkembangan ekonomi suatu negara.
4. Akan terciptanya kesenjangan ekonomi global karena tidak cukup bersaing dan ketertinggalan di sektor teknologi.
5. Negara yang kuat akan bersosialisasi dengan baik untuk mendapatkan profit yang seluas-luasnya.
6. Kemungkinan besar berlakunya kapitalisme di Indonesia dimana perekonomian dikuasai oleh produsen yang memiliki modal yang cukup/besar alhasil membuat yang minim modal akan tersisih.
7. Berkurangnya sektor ekonomi tradisional dan rakyat yang memanfaatkan subsidi.
8. Brand lokal dapat kalah bersaing dengan brand impor sehingga membuat pebisnis lokal gulung tikar
9. Konsumen lokal luas tidak sedikit yang beralih ke produk bermerek internasional (impor).
10. Bila banyak investor luar yang masuk ke dunia kerja di pasar indonesia. Sudah otomatis, lapangan pekerjaan akan makin minim dan jumlah pengangguran akan semakin bertambah.⁵

⁵ Gupta, R.K., dan Chandra, P. *Integrated Supply Chain Management in the Government Environment*. A paper presented at the International Conference – OPSCON-98 on

Perilaku Bisnis yang Tidak Etis

Perwujudan bisnis adalah untuk menciptakan nilai, laba/keuntungan untuk para pemegang saham. Perusahaan berkepentingan guna memperoleh pemasukan dari pekerjaan untuk diri sendiri dan keluarga. Pemasukan dan tambahan prosedur dan pekerja akan meningkat jika mereka mampu meningkatkan profit. Perusahaan dan menekan biaya produksi dan operasional. Tujuan manajemen untuk meningkatkan laba semestinya tidak mengabaikan standar etika yang berlaku agar tidak merugikan Industri, konsumen, dan para.⁶

Pada masa ini berlaku peningkatan jumlah Perusahaan yang berusaha meningkatkan laba, tetapi cenderung melanggar etika, seperti software taksi grab dianggap melanggar privasi pemegang iPhone, lalu pemberian ijin kepada pengolahan lahan atau eksplorasi yang justru tidak ramah lingkungan. Hal yang senada juga dilakukan oleh perusahaan Nestle terkait dengan promosi susu formula bayi di Inggris pada 45 tahun lalu. Nestle S.A adalah pembuat susu formula yang berpusat di Vevey, Swiss yang telah berjalan selama kurang lebih 150 tahun. Dalam melakukan iklan, Nestle cenderung melanggar etika, seperti iklan-iklan di promosinya yang bertuliskan : 'Ibu jaman sekarang paham yang terbaik untuk bayinya, yaitu susu formula Nestle'. Disamping itu, Perusahaan Nestle membagikan sampel kepada para dokter kandungan dan bidan untuk mempromosikan susu formula kepada pasien. Iklan ini juga memberikan edukasi yang salah kepada ibu-ibu yang baru melahirkan dengan cara memberikan sachet-sachet susu secara bebas atau memberikan susu formula selama perawatan melahirkan ibu dan anak selama di Rumah Sakit, sehingga diharapkan mendorong para ibu untuk memberikan susu formula setelah Kembali ke rumah.

Sekitar tahun 1974, Pan American Health Organization (Organisasi Kesehatan Seluruh Amerika) menyatakan Nestle secara terang-terangan atau tidak langsung dituduh terlibat dalam kematian bayi-bayi di negara-negara berkembang. Tuduhan tersebut berkisar pada penjualan susu formula bayi yang diduga sebagai penyebab dari kematian bayi secara massal.

⁶ Brooks, L. J. 2010. Business and Professional Ethics for Directors, Executives, and Accountants. International Edition, Canada: South-Western Cengage Learning, pp.256.

Para wartawan inggris melaporkan bahwa Tindakan memberikan sachet-sachet susu formula secara gratis kepada ibu-ibu yang habis melahirkan dianggap tidak etis karena hal ini membentuk pola pikir ibu-ibu modern guna memberikan susu formula guna menggantikan air susu ibu (ASI). Menurut penelitian medis, ASI/Air Susu Ibu ialah susu terbaik untuk bayi karena mengandung gizi dan kekebalan yang diperlukan oleh bayi hingga berusia 2 tahun. Dampak dari peristiwa ini adalah terjadinya pemboikotan besar-besaran di inggris, yang menjadi pukulan berat bagi produsen susu formula Lactogen-Nestle.⁷

Faktor Penentu Perilaku Tidak Etis

Etika berkaitan dengan keyakinan perorangan mengenai suatu keputusan, perilaku, dan Tindakan dianggap benar atau salah. Perilaku etis dapat berbeda antara satu orang dengan lainnya, misalnya Rudi menemukan uang Rp. 50.000 terjatuh di sebuah ruang kosong maka alternatif Tindakan Rudi adalah :

- a. Mengambil uang tersebut dan menyimpannya
- b. Mencari orang yang kehilangan di ruang-ruang lain
- c. Menyumbangkan uang tersebut

Meski etika dapat berbeda secara individual, tetapi terdapat etika yang diterima dan berlaku umum. Dengan demikian, faktor yang memicu terjadinya perilaku tidak etis tidaklah Tunggal, tetapi bermacam-macam.

Etika bisnis tidak terpisahkan dari etika individu. Etika individu mengatur idealism, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh setiap individu. Pendidikan etika di sekolah, keluarga, Masyarakat, dan nilai-nilai keagamaan yang baik dan benar, memberikan sumbangsih terbesar pada pembentukan etika pribadi seorang individu. Nilai dan etika yang dianut oleh seorang individu akan tersirat dan tersurat pada kebijakan, keputusan, dan rekam jejak pada kehidupan sehari-hari, bahkan pada bisnis domestic dan internasional yang dikelolanya.⁸

⁷ <https://books.google.co.id/books?isbn=9796914115>

⁸ Mason, R. 1986. Four Ethical Issues of Information Age. MIS Quartely, Vol. 10 (5): pp.5-11.

Beberapa studi perilaku yang tidak etis dalam bisnis menyimpulkan bahwa pebisnis sering tidak menyadari telah berperilaku tidak etis. Kesalahan manajer terjadi Ketika dirinya mengabaikan pertimbangan etis dan hanya melibatkan pertimbangan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Contoh, Ketika produsen sepatu Nike mencari subkontraktor di negara-negara lain, keputusan-keputusan untuk memilih Perusahaan subkontraktor dibuat berdasarkan pada logika ekonomi yang baik. Subkontraktor dipilih hanya berdasarkan variable bisnis, seperti biaya pengiriman, biaya produksi, dan kualitas produk. Manajer Nike tidak akan pernah bertanya, 'Bagaimana Subkontraktor ini memperlakukan tenaga kerja ?' 'Berapa lama mereka bekerja ?' Berapa gaji dan uang lembur mereka ?' sebagai contoh, Keputusan tidak etis juga terjadi pada pabrik obat Pfizer yang mengujicobakan obat baru pada anak-anak penderita meningitis di Nigeria.

Owner dan pimpinan Perusahaan lokal penting memiliki nilai-nilai budaya organisasi yang etis secara konsisten dan continue di negara manapun mereka beroperasi. Nilai-nilai budaya organisasi yang etis dan selalu dilekatkan dengan kebijakan., sistem dan prosedur akan menjadi panutan bagi seluruh karyawan. Nilai-nilai budaya organisasi ini menjadi pedoman dalam :⁹

- a. Merekrut, menyeleksi/memilih, mengembangkan, menyejahterakan karyawan, serta bekerja terbaik untuk pemegang saham.
- b. Memproduksi produk yang berkualitas, berintegritas dan aman kepada konsumen;
- c. Berinteraksi dengan pemasok, pemerintah, dan pihak-pihak lain dengan jujur dan bersih bebas KKN
- d. Mempedulikan kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat sekitar

Suasana di beberapa bisnis tidak mendorong individu untuk memikirkan konsekuensi dari etika keputusan bisnis. Ini membawa kita kepada penyebab ketiga perilaku yang tidak etis dalam bisnis-budaya organisasi yang menekankan etika bisnis. Sama seperti Masyarakat yang memiliki budaya, begitu pula organisasi bisnis. Nilai-nilai dan norma-norma akan

⁹ Post, J.E., Lawrence, A.T dan Weber, J. 2002. Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics. 10th ed. Pearson: pp.398-399.

membentuk budaya organisasi bisnis dan budaya memiliki pengaruh penting terhadap etika pengambilan keputusan bisnis.

Adanya tekanan dari Perindustrian/Perindustrian induk untuk memenuhi tujuan kinerja yang tidak realistis sering kali hanya dapat dicapai dengan jalan pintas atau bertindak yang tidak etis. Sebagai contoh, untuk memenuhi target produksi telepon pintar iPhone, Perusahaan Foxconn yang berlokasi di China didakwa telah melakukan pelanggaran jam kerja dan keamanan yang buruk. Selain produk Apple, Foxconn juga memproduksi perangkat berteknologi tinggi untuk merek Hewlett-Packard dan Microsoft. Ketika diperiksa oleh pengawas independent yang berasal dari Asosiasi Tenaga Kerja Amerika Serikat (FLA) ditemukan bukti bahwa Foxconn telah memaksa para pekerjanya untuk bekerja lebih dari 60 jam lebih dalam seminggu dan kadang bekerja selama tujuh hari tanpa hari libur. Pelanggaran lainnya adalah kerja lembur yang tidak dibayar dan risiko Kesehatan dan keamanan yang tinggi. Gaji rata-rata sebulan di tiga pabrik berkisar antara US\$ 360 atau sekitar Rp. 3,3 juta hingga US\$ 455 atau Rp. 4,1 juta.

Dalam suatu organisasi, pemimpin berperan dalam membangun budaya organisasi melalui contoh-contoh perilaku nyata yang akan diikuti oleh orang lain. Tindakan pemimpin organisasi, baik etis maupun tidak, akan memberi Pelajaran bagi orang lain untuk melakukan yang sama. Dengan demikian, yang penting bukanlah apa yang telah diucapkan pemimpin, tetapi segala tindakanya di dalam organisasi atau Perusahaan. Perusahaan migas Enron yang bangkrut pada awal tahun 2000 misalnya, meskipun memiliki kode etik, tetapi dalam praktiknya ternyata justru melanggar kode etik tersebut guna memperoleh profit yang tinggi dan mengelabui laporan keuangan yang disampaikannya ke masyarakat.

Isu-Isu Etika dalam Bisnis Internasional

Kesimpangsiuran berita dalam bisnis internasional berpusat pada kenyataan bahwa sistem politik hukum, Pembangunan ekonomi, dan budaya bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya. Dalam bisnis Internasional, Isu-isu etis yang sangat umum terjadi adalah praktik ketenagakerjaan, hak asasi manusia (HAM), pencemaran lingkungan, korupsi, serta kewajiban moral Perusahaan multinasional.

Pengaplikasian kerja dalam bisnis Internasional adalah pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga kerja di Perusahaan yang berjalan di berbagai negara. Isu-isu yang muncul terkait dengan praktik kerja meliputi mempekerjakan karyawan di bawah usia, waktu kerja sangat Panjang, gaji yang jauh dari cukup, kondisi kerja buruk, lingkungan kerja dan sanitasi kerja yang buruk. Perusahaan multinasional seharusnya tidak menoleransi Perusahaan rekanan kerja di negara lain yang melaksanakan praktik-praktik kerja yang tidak etis. Perusahaan multinasional harus menetapkan standar minimal yang dapat diterima untuk melindungi hak-hak dasar dan martabat karyawan serta mengaudit anak Perusahaan asing dan subkontraktor secara teratur untuk memastikan standar tersebut terpenuhi dan mengambil Tindakan korektif jika subkontraktor terbukti melakukan pelanggaran etika. Contoh Kasus ketenagakerjaan di India memberitahukan tingginya perilaku tidak etis yang dilakukan oleh para subkontraktor Perusahaan multinasional di India.

Hak Asasi Manusia adalah hak semua manusia guna memiliki kebebasan berserikat, berbicara, berkumpul, bergerak, memilih, kebebasan dan penindasan politik, dan lain sebagainya. Perusahaan/Perindustrian yang mempedulikan Hak Asasi Manusia umumnya juga menerima keragaman tenaga kerja. Hal ini bermakna Perusahaan dilarang melakukan diskriminasi terhadap tenaga kerja, sesuai dengan UU No. 21 Tahun 1999 yang mengacu kepada Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 111 Tentang Diskriminasi Dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan. Menurut Konvensi ILO tersebut, istilah diskriminasi mengacu pada :

1. Setiap perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.
2. Perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan lainnya yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana telah ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan wakil organisasi pengusaha dan pekerja jika ada serta dengan badan lain yang sesuai.

Istilah pekerjaan dan jabatan dalam konvensi ini meliputi juga kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan, memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu, dan syarat-syarat serta

kondisi kerja.¹⁰ Adapun keputusan manajemen induk Perusahaan multinasional untuk menempatkan tenaga kerja asing guna menduduki posisi tertentu, seperti Direktur Utama, Kepala Divisi, atau kepala yang lain bukanlah suatu pelanggaran etika. Dalam memilih orang-orang yang tepat untuk menempati posisi-posisi strategis tersebut, pihak manajemen Perusahaan induk tentu akan menetapkan persyaratan yang lebih banyak, disesuaikan dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

Isu-isu etis muncul Ketika peraturan lingkungan di negara-negara tujuan lebih longgar dibandingkan di negara asal. Banyak negara maju yang memiliki peraturan substansial untuk mengatur emisi polutan, pembuangan bahan-bahan kimia beracun, penggunaan bahan-bahan beracun di tempat kerja, dan lain sebagainya. Berbagai peraturan yang diterapkan negara maju sering kali diabaikan di negara-negara tujuan alhasil tingkat pencemaran Perusahaan multinasional yang berjalan disana melebihi ketentuan atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata yang telah ditetapkan oleh negara asal. Hal tersebut sering mengakibatkan pemboikotan atas praktik-praktik Perusahaan multinasional, contohnya seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 2010 lalu, di mana dua Perusahaan Eropa, Unilever dan Nestle menolak membeli minyak kelapa sawit mentah dari Indonesia. Aksi pemboikotan ini terkait dengan isu lingkungan yang dilancarkan oleh LSM internasional dari Eropa yang beranggapan bahwa kelapa sawit Indonesia sebagai green monster sehingga muncul kampanye negative atas CPO sebagai bagian dari program green colonialism.

Korupsi merupakan masalah serius yang berkembang pada hampir seluruh Masyarakat dan terus menjadi salah satu masalah terbesar hingga saat ini. Telah ada dan akan selalu ada pejabat eksekutif pemerintah yang menjadi koruptor. Korupsi tetap terjadi dengan alasan Perusahaan multinasional dapat memperoleh keuntungan ekonomi dengan melakukan pembayaran kepada sejumlah pejabat, sementara UU antikorupsi belum menetapkan hukuman yang menimbulkan efek jera. Amerika Serikat melalui Foreign Corrupt Practices Act yang bertujuan untuk memerangi korupsi, melarang kepada setiap Perusahaan Amerika Serikat membayar suap kepada pejabat pemerintah asing untuk mendapatkan bisnis. Pada tahun 1997, para Menteri perdagangan dan keuangan dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan telah mengikuti jejak Amerika Serikat yang

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4e839394d938a/aturan-tentang-diskriminasi-di-tempat-kerja>

memimpin dan mengadopsi Konvensi Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional. Di samping itu, mereka juga mewajibkan negara-negara anggota untuk menetapkan suap pejabat public asing sebagai Tindakan criminal.

Sekitar tahun 2016, Indonesia mengalami peningkatan Indeks Persepsi Korupsi dibandingkan sebelumnya. Transparency International Indonesia menyatakan, CPI Indonesia pada 2016 naik satu poin menjadi 37 dari angka tertinggi 100, tetapi secara global posisi Indonesia masih berada di urutan ke-90. Hal ini menunjukkan perbaikan birokrasi dan pembentukan Program Sapu Bersih Pungutan Liar yang dilakukan Presiden Jokowi memberikan hasil positif. Kenaikan skor CPI dan terpilihnya pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi membawa optimism besar atas pemberantasan korupsi. Optimisme publik ini perlu disikapi dengan perumusan strategi untuk mencapai target pencapaian CPI dibawah pimpinan baru KPK. Salah satu indikator yang diukur oleh TII adalah cost of doing business yang dalam konteks kemudahan berusaha di mana korupsi di sektor penegakan hukum akan memberikan efek ketidakpastian yang tinggi terhadap bisnis. Berdasarkan Survei Persepsi Korupsi 2015, ada enam sektor yang rawan penyuapan, yaitu sektor konstruksi, pertambangan, migas, industry, perdagangan dan kehutanan.

Perusahaan multinasional memiliki kekuatan modal dan kemampuan teknis untuk mengendalikan sumber daya dan memindahkan produksi dari satu negara ke negara lain. Tanggungjawab sosial Perusahaan adalah Tindakan mempedulikan lingkungan sosial sekitar Perusahaan melalui Pembangunan fasilitas, beasiswa pendidikan, pinjaman modal kepada UMKM dengan angsuran ringan, dan lain sebagainya. CSR merupakan sarana bagi Perusahaan untuk dapat mencapai tujuan jangka Panjang agar memperoleh laba dan memiliki kesinambungan usaha di wilayah tersebut.

Kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dan manfaat yang besar dengan biaya yang efisien kepada konsumen. Kendati demikian, teknologi turut pula berperan dalam kasus-kasus pelanggaran etika, seperti penipuan, pembobolan dana nasabah bank, atau pelanggaran hak privasi pengguna teknologi. Sebagai contoh adalah kasus pelanggaran hak privasi oleh layanan taksi daring Uber kepada para pengguna telepon pintar iPhone/Apple.¹¹

¹¹ <http://indowarta.com/28310/apple-berencana-tendang-uber-dari-app-store/>

Apple dikenal sangat serius menjaga hak privasi pengguna iPhone. Apple menduga Uber telah mengembangkan teknologi yang memungkinkan Uber untuk secara diam-diam mengidentifikasi dan melakukan tag kepada para pengguna iPhone, meski aplikasi tersebut sudah dihapus dari iPhone oleh pengguna. Ketika mengetahui hal tersebut, CEO Apple meminta Uber untuk menghentikan praktik tersebut. Jika hal ini tidak dilaksanakan, aplikasinya akan dihapus dari App Store. Hal ini merupakan sanksi yang berat bagi Uber, yaitu kehilangan akses kepada jutaan pengguna iPhone sehingga berpotensi menghancurkan bisnis Uber. CEO Uber, Travis Kalanick, berupaya untuk memenuhi permintaan Cook. Namun, pihak Uber membantah jika aplikasinya digunakan untuk melacak lokasi individu yang menggunakan aplikasinya. Fitur yang diduga melanggar privasi tersebut berfungsi sebagai pendeteksi penipuan. Uber tidak melacak pengguna atau lokasi konsumen Ketika konsumen menghapus aplikasinya. Ini adalah cara yang tipikal mencegah penipuan loading aplikasi Uber yang berasal dari ponsel curian, kartu kredit curian, atau reservasi perjalanan dengan tarif mahal.

Simpulan

Globalisasi ditandai dengan maraknya perjanjian Kerjasama regional antarnegara, antara lain AFTA, MEA, dan UE. Hal ini memunculkan tantangan baru di bidang bisnis di mana produk dan jasa buatan Indonesia harus bersaing ketat dengan produk dan jasa dari negara-negara lain yang masuk ke Indonesia.

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menyebabkan tidak adanya batas-batas antarnegara. Hal ini menjadi salahsatu pemicu makin banyaknya tenaga kerja asing berpendidikan dan berketerampilan tinggi untuk bekerja di Indonesia yang kelak menjadi pesaing Saudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Altham, J. 2001. *Business Ethics versus Corporate Social Responsibility: Competing or Complementary Approaches*. International Business Ethics Review, pp. 10-12
- Arneson, Richard. 2008. *Equality of Opportunity*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2008 Edition. August 29.
- Birdi, K., et. al. 2008. *The Impact of Human Resource and Operational Manajemen Practices on Company Productivity*. Personnel Psychology, Vol.61, pp. 467-501.
- *Supply Chain Management for Global Competitiveness*. November 20-21, 1998, Management Development Institute, Gurgaon.
- Gupta, R.K., dan Chandra, P. *Integrated Supply Chain Management in the Government Environtment*. A paper presented at the International Conference - OPSCON-98.
- Brooks, L. J. 2010. *Business and Professional Ethics for Directors Executives, and Accountants*. International Edition, Canada: South-Western Cengage Learning, pp.256.
- <https://books.google.co.id/books?isbn=9796914115>
- Mason, R. 1986. Four Ethical Issues of Information Age. MIS Quartely, Vol. 10 (5): pp.5-11.
- Post, J.E., Lawrence, A.T dan Weber, J. 2002. *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy Ethics*. 10th ed. Pearson: pp.398-399.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4e839394d938a/aturan-tentang-diskriminasi-di-tempat-kerja>
- <http://indowarta.com/28310/apple-berencana-tendang-uber-dari-app-store/>